

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan terhadap prosedur penyusunan anggaran pada badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BP2KB), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok dalam kesejahteraan keluarga terutama perempuan dan anak-anak serta pengawasan jumlah penduduk dengan program-program yang telah direncanakan.
2. Proses penyusunan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana asecara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Namun dalam tahap awal Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan Renja di SKPD. Sementara itu, tahap yang sudah sesuai yaitu: Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD sedangkan SKPD menyusun RKA-SKPD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda kemudian menetapkan Perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada Kepala SKPD agar menyusun DPA-

SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD. Maka berdasarkan tahap tersebut, prosedur penyusunan anggaran yang sudah dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) sudah sesuai.

3. Dokumen yang digunakan untuk prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

5.2 Saran

Prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tetapi masih ada beberapa masalah yang menjadi halangan dalam penyusunan anggarannya. Maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi Kepala Badan yang memimpin, saran tersebut adalah :

1. Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) dan Pemerintah Daerah hendaknya dapat memaksimalkan potensi daerah yang terdapat di Kota Pariaman agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkat sehingga ketergantungan daerah terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar.
2. Realisasi belanja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) terutama untuk belanja langsung sebaiknya dapat dilakukan serendah mungkin agar memenuhi kriteria efisien seperti dengan membuat kebijakan rapat agar tidak dilakukan di hotel.

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs website yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

